

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI BIDANG PENDIDIKAN**

(Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area)

SKRIPSI

OLEH:

**NURUL JANNAH
168520030**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI BIDANG PENDIDIKAN**

(Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

**NURUL JANNAH
168520030**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Maren IV Kecamatan Medan Area)

Nama Mahasiswa : Nurul Jamiah

NPM : 15.352.0030

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Drs. Indra Muda, MAP
Pembimbing I

Drs. Bahrum Jamil, MAP
Pembimbing II



Dj. Alen Kusmanto, MA
Dekan Fisip

Nina Angella, S.Sos, M.Si
Ka Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 17 Oktober 2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 17 Oktober 2020



Nurul Jannah
16.852.0030

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Jannah
NPM : 168520030
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul: Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

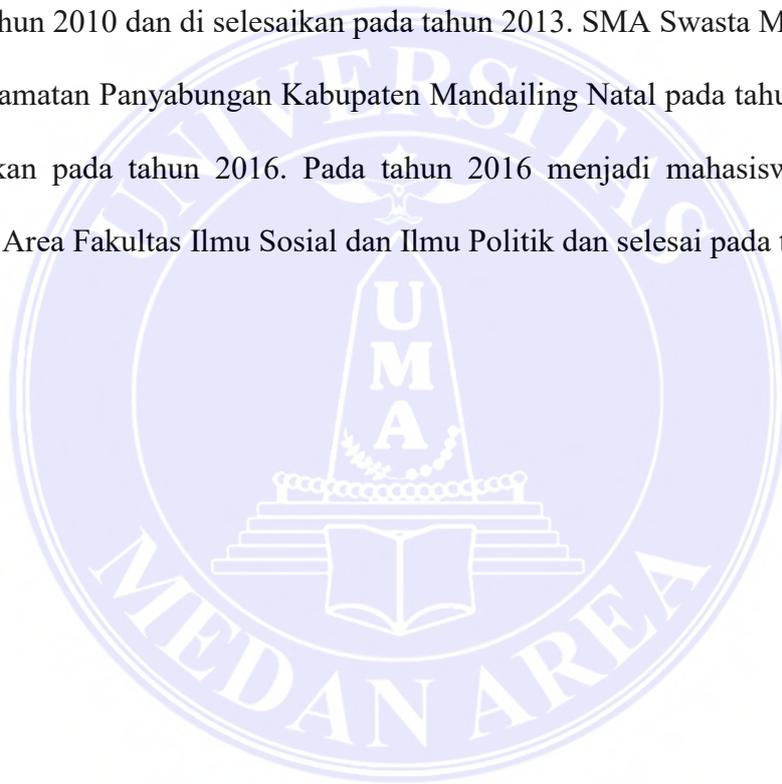
Dibuat di : Medan
Pada tanggal: 17 Oktober 2020
Yang Menyatakan



(Nurul Jannah)

RIWAYAT HIDUP

Nurul Jannah di lahirkan pada tanggal 05 Januari 1998 di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali, anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan bapak Jonnedy Lubis dan Ibu Faridah Hannum Nasution. Pendidikan formal penulis di mulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 142599 di Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2004 dan di selesaikan tahun 2010. SMP Swasta Muhammadiyah 31 Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2010 dan di selesaikan pada tahun 2013. SMA Swasta Muhammadiyah 13 Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2013 dan di selesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 menjadi mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selesai pada tahun 2020.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area)”. Skrip ini di tulis dalam rangka memenuhi salah satu gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik di Universitas Medan Area.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, dan dukungan baik dari segi moral ataupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat cinta dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama berterima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Jonnedy Lubis dan ibu Faridah Hannum Nasution yang telah memberikan dukungan doa, motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Indra Muda, MAP, selaku Dosen Pembimbing I telah memberikan pengarahan serta masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Bahrum Jamil, MAP, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Hardiyanti Arini, S.Sos, MAP, selaku sekretaris saat seminar yang telah banyak berperan dalam membantu serta memberikan pengarahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M. Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) selaku lembaga pemerintah yang memberikan bantuan Beasiswa Bidik Misi kepada penulis sehingga penulis bisa kuliah dan dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Biro Administrasi Keuangan (BAK) Universitas Medan Area dan seluruh staff yang telah membantu penulis untuk mendapatkan beasiswa Bidik Misi sehingga penulis bisa kuliah dan dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Deddy Irwanto Pardede, SP, MAP dan seluruh staff kantor Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan serta ibu Dini Muliani, SH dan seluruh pendamping PKH Kota Medan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area yang sudah membantu dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian skripsi ini.
10. Ibu Sahida Erni Nasution selaku Kasi Pembangunan Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area dan ibu Yaheni serta masyarakat penerima PKH Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area

yang telah membantu dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian skripsi ini.

11. Kepada adik – adik penulis atas bantuan dan dukungannya untuk penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Bou Uli, Bou Upik, Uak Elna, Pak Sulaiman beserta keluarga besar atas dukungan dan bantuannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Publik stambuk 2016 khususnya kepada Aulia, Astri, Bagus, Meliani, Pebru, Riri, Yenny dan kakak Sahra Yusna dan semua teman – teman stambuk 2016 yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam membantu membantu penulisan skripsi ini.

Demikian lah skripsi ini dimuat, sekiranya skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan penulis. Oleh karena itu, kritikan dan saran positif selalu di harapkan penulis untuk memperbaiki skripsi ini.

Medan, 17 Oktober 2020

Penulis

Nurul Jannah
168520030

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN.....	IV
RIWAYAT HIDUP	VI
ABSTRAK	VII
ABSTRACT.....	VIII
KATAPENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR GAMBAR.....	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kebijakan Publik	6
2.2 Implementasi Kebijakan	8
2.3 Kemiskinan dan Permasalahannya	12
2.4 Pendidikan dan Perkembangannya.....	14
2.5 Program Keluarga Harapan (Permensos tentang PKH Nomor 1 Tahun 2018)	15
2.5.1 Pengertian Program Keluarga Harapan	15
2.5.2 Tujuan Program Keluarga Harapan.....	20
2.5.3 Manfaat Program Keluarga Harapan.....	20
2.5.4 PKH Bidang pendidikan.....	21
2.5.5 Sasaran Penerima PKH.....	22
2.6 Kerangka Pemikiran	24
2.7 Penelitian Sejenis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	31
3.3 Waktu Penelitian	31
3.4 Informan Penelitian.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik analisis Data	35

BAB IV	HASIL DAN PENELITIAN	37
4.1	Hasil Penelitian.....	37
4.1.1	gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.2	Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Kota Matsum IV .	38
4.1.3	Visi, Misi, dan Motto Kelurahan Kota Matsum IV	39
4.1.4	Demografi Kelurahan Kota Matsum IV	40
4.2	Program Keluarga Harapan (PKH)	45
4.2.1	Latar Belakang Program Keluarga harapan.....	45
4.2.2	Pelaksana Program Keluarga Harapan	47
4.3	Pembahasan Penelitian	49
4.3.1	Implementasi Kebijakan PKH Di Bidang pendidikan Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area	49
4.3.2	Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan PKH Di Bidang pendidikan Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area	82
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		88
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Kota Matsum IV	41
4.2 Jenis Etnis Suku Di Kelurahan Kota Matsum IV	42
4.3 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan tahun 2019 – 2020 (Unit) ...	43
4.4 Jenjang pendidikan Masyarakat Kelurahan Kota Matsum IV	44
4.5 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Kota Matsum IV	45



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Gambar Kerangka Pemikiran	26
4.1 Gambar Struktur Pelaksanaan PKH Di Kecamatan Medan Area.....	48



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI BIDANG PENDIDIKAN (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area)

Pendidikan merupakan proses mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat menimbulkan perubahan baik dalam diri maupun dilingkungan masyarakat. Akan tetapi, minimnya ekonomi membuat anak – anak tidak bersekolah bahkan putus sekolah karena ikut membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan kendala dalam program keluarga harapan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang mengetahui informasi tentang implementasi kebijakan PKH, studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi untuk mendukung hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area keberhasilannya dilihat dari beberapa faktor yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusia dan sumber daya uang, karakteristik agen pelaksana PKH sudah sesuai dengan buku pedoman, sikap para pelaksana PKH mendampingi penerima dengan baik, komunikasi organisasi pelaksana terjalin dengan baik, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mendukung adanya PKH. Penelitian ini disimpulkan perekonomian masyarakat terbantu terutama bidang pendidikan, dengan PKH penerima bantuan dapat menyekolahkan anak – anak nya walaupun masih ada kendala yaitu minimnya anggaran dana menyebabkan banyak kegiatan belum terlaksana.

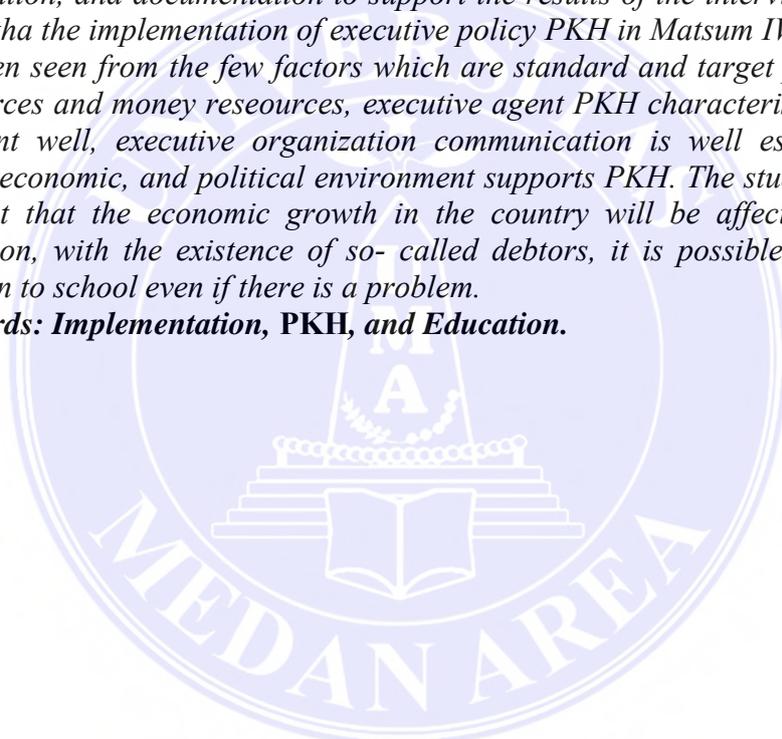
Kata Kunci : Implementasi, PKH, dan Pendidikan.

ABSTRACT

***Implementation Of Educational Family Program (PKH)
Policy in the field of education
(case study in the urban village of matsum IV, Medan Area)***

Education is the process of influencing learners to adapt to the environment and can bring about changes in both within and within the community. However, the scarcity of economics precludes schooling and even dropouts because they help families make ends meet. The study aims to know the implementation of policies and obstacles in the hope family program in Matsum IV district Medan Area. The study employs qualitative methods in which it is descriptive that give a clear picture of the problem at hand. Data collection techniques through interviews to informants who know information about the implementation of PKH policy, literature studies, observation, and documentation to support the results of the interview. The study shows tha the implementation of executive policy PKH in Matsum IV, Medan Area has been seen from the few factors which are standard and target policy, human reseources and money reseources, executive agent PKH characteristics assist the recipient well, executive organization communication is well established, the social, economic, and political environment supports PKH. The study is based on the fact that the economic growth in the country will be affected mainly by education, with the existence of so- called debtors, it is possible to send their children to school even if there is a problem.

Keywords: Implementation, PKH, and Education.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan proses mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dapat menimbulkan perubahan – perubahan baik dalam diri maupun di lingkungan masyarakat. Dengan pendidikan manusia akan terus berkembang dan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dalam arti dapat menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), kompetitif, terampil, jujur, bermoral tinggi dan dapat menghargai pendapat orang lain. Dengan pendidikan akan dapat menciptakan manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara.

Terkait dengan pendidikan, pemerintah membuat program wajib belajar Sembilan tahun, enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini di atur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial program keluarga harapan dijalankan sebagai pelaksana dari Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial Pasal 19 “penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang di lakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian program keluarga

harapan di rancang dalam membantu masyarakat miskin berupa bantuan sosial yaitu dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Program keluarga harapan memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan harus sesuai dengan kriteria yaitu masuk dalam kategori kurang mampu dan dengan komponen pendidikan yaitu dengan kriteria anak SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA. Bantuan program keluarga harapan juga bagi ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, dan lanjut usia mulai dari umur enam puluh tahun.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatra Utara sejak 2008 dan di terapkan di tiga Kabupaten/Kota yaitu Medan, Tapanuli Tengah, dan Nias. Pelaksanaan PKH di Kota Medan sudah ada di 21 Kecamatan salah satunya di Kecamatan Medan Area. Peserta PKH di Kecamatan Medan Area hanya berdomisili pada delapan Kelurahan. Kemudian pada tahun 2016 seluruh Kelurahan di Kecamatan Medan Area sudah ada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terutama di Kelurahan Kota Matsum IV.

Kelurahan Kota Matsum IV Merupakan wilayah masyarakat hanya memperoleh alokasi paling sedikit di bandingkan di Kelurahan lain yang ada di Kecamatan Medan Area. Kondisi masyarakat di Kelurahan Kota Matsum IV sangat beragam, terutama dalam bidang pekerjaan yang di lakukan masyarakat seperti:tukang becak, buruh cuci, buruh pabrik, bahkan masih banyak masyarakat pengangguran. Dengan bidang pekerjaan tersebut terkadang melibatkan anak sebagai pekerja. Dengan keterlibatan seluruh anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sangat berdampak pada pendidikan anak tersebut. Akses pelayanan pendidikan sudah tersedia dan lebih dekat dengan tempat tinggal,

sekolah swasta dan sekolah negeri banyak tersedia mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMA. Sementara masyarakat miskin banyak yang tidak bersekolah di sebabkan anak – anak mereka ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area berdasarkan hasil obsevasi yang dilakukan peneliti terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, program ini belum sepenuhnya mencapai tujuan yang sudah di tetapkan pada buku pedoman umum program keluarga harapan. Penerima bantuan program keluarga harapan tingkat kondisi ekonomi masih rendah sehingga kebutuhan anggota keluarga belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut di tandai dengan masih ada penerima program keluarga harapan hidup dalam ketidakberdayaan dan tinggal pada rumah tidak layak huni, dengan kondisi ekonomi tersebut menyebabkan sebagian anak – anak terancam putus sekolah. Kemudian masalah lainnya adalah bantuan program keluarga harapan belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, sehingga mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat, serta terhambatnya pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan di karenakan minimnya anggaran dana.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Keluarga Harapan (PKH) Dibidang Pendidikan (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan program keluarga harapan bidang pendidikan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

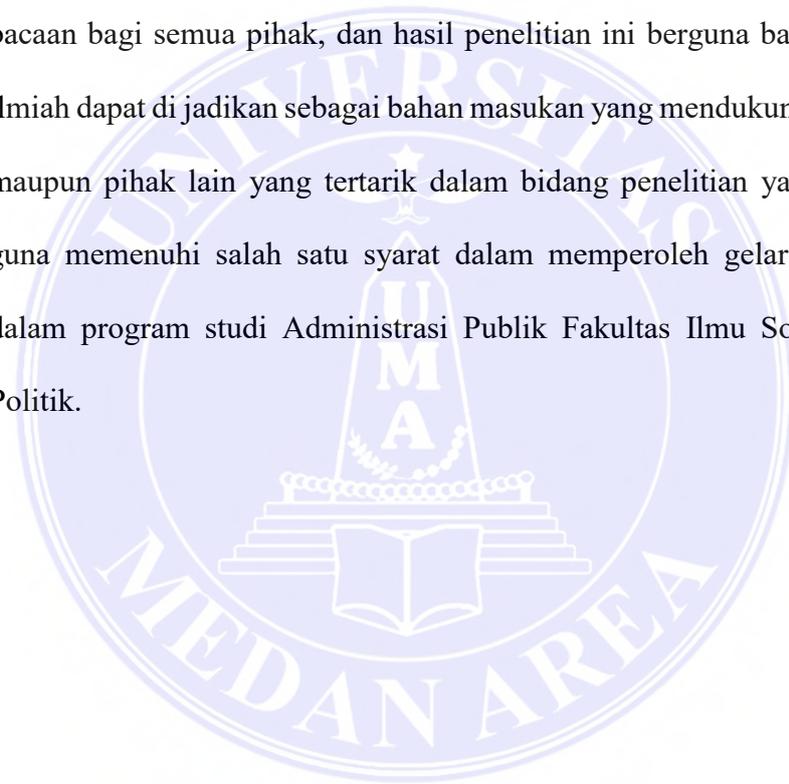
Sebagai sumber informasi dan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan, dan menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi maupun rencana pembuatan kegiatan bagi Program Keluarga Harapan Kota Medan dan Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area agar program PKH berjalan dengan baik.

3. Bagi universitas

Hasil dari penelitian di harapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak, dan hasil penelitian ini berguna bagi suatu karya ilmiah dapat di jadikan sebagai bahan masukan yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama serta guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang di kembangkan oleh badan serta pejabat pemerintah dalam karakteristik khusus kebijakan yaitu suatu keputusan di rumuskan sebagai otoritas dalam politik seperti para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat para raja, dan sebagainya.

Menurut Keban (2004 : 55)

Kebijakan Publik dapat di lihat sebagai produk karena kebijakan di pandang sebagai kesimpulan dan organisasi, sebagai proses karena kebijakan di pandang sebagai cara dengan cara tersebut organisasi dapat akan mengetahui apa yang akan di harapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai tujuannya, sebagai filosofi karena serangkaian dari prinsip dan kondisi yang di inginkan., dan sebagai kerangka kerja karena proses kegiatan tawar – menawar ataupun negoisasi dalam merumuskan isu dan metode pengimplementasinya.

Menurut J Federick dalam Leo Agustino (2008:7)

Kebijakan merupakan sebagai serangkaian tindakan ataupun kegiatan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan serta kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini menunjukkan bahwa ide-ide dari kebijakan melibatkan perilaku memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian terpenting dari defenisi kebijakan, karena kebijakan harus menunjukkan hasil dari pekerjaan dari pada mengusulkan kegiatan pada suatu masalah.

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas di kutip dalam Mulyadi (2016:36) “Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan dan yang tidak di kerjakan oleh pemerintah”. Sedangkan menurut R Dye dalam Kencana Syafe’I (2011 : 115) menyebutkan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang di pilih oleh pemerintah untuk di kerjakan ataupun tidak di kerjakan”. Defenisi tersebut menjelaskan kebijakan publik tidaklah harus di pandang sebagai hal yang di

lakukan oleh pemerintah dalam merespon kepentingan publik tetapi sikap diam pemerintah pun terhadap persoalan yang di anggap sebagai kebijakan pemerintah, hal ini di karenakan pemerintah telah mempunyai perhitungan tersendiri dalam merespon suatu persoalan publik untuk di tindak lanjuti atau di diamkan.

Menurut Rusli (2013 : 9) “kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik dan bukan tujuan dari seseorang, orang perorang, golongan maupun kelompok”. Keberadaan kebijakan publik sangat penting karena keeberadaanya menentukan tercapainya tujuan meskipun masih ada syarat dan tahap – tahap lain yang harus di penuhi sebelum sampai ke dalam tujuan yang di tetapkan.

Kemudian tahap – tahap pembuatan kebijakan menurut William Dunn dalam Tangkilisan (2003 : 6) “ada lima tahap yaitu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian/impelementasi kebijakan”. Adapun penjelasan dari tahap – tahap kebijakan sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai yang disebut dengan masalah publik dan agenda publik yang perlu di perhitungkan.

Munculnya masalah publik dan agenda publik karena ada nya isu dan sudah timbul menjadi masalah publik, maka isu tersebut mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda sangat penting dalam menentukan isu yang telah di angkat di dalam agenda pemerintah. Masalah pada suatu kebijakan biasanya muncul karena terjadi perbedaan pendapat

di antara beberapa orang dalam kelompok tersebut tentang suatu kegiatan yang akan di buat.

b. Formulasi Kebijakan

Setelah ada masalah di dalam agenda kebijakan Kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut di defenisikan kemudian di cari solusi yang terbaik. Solusi tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pemilihan kebijakan yang ada.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan dari Legitimasi/adopsi adalah untuk memberikan otorisasi dalam proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi di dalam masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan dari pemerintahan. Namun setiap warga negara harus mempercayai tindakan – tindakan dari pemerintah untuk mendukung rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat di kelola melalui manipulasi simbol – simbol tertentu di mana melalui proses ini masyarakat belajar dalam mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Setelah kebijakan dibuat maka akan diimplementasikan atau dilaksanakan kebijakan dari masalah tersebut supaya mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam kebijkana publik.

e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat di katakan sebagai kegiatan

yang menyangkut dalam estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai kegiatan fungsional yaitu evaluasi tidak hanya dilakukan sebagai pada tahap akhir saja namun juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan meliputi tahap perumusan masalah – masalah kebijakan, program – program untuk menyelesaikan masalah, serta implmentasi maupun tahap dari dampak kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi disebut sebagai proses yang baru di mulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan program kegiatan telah tersusun dan siap untuk di salurkan. Implementasi kebijakan yaitu langkah maupun cara dalam pembuatan kebijakan dalam mencapai tujuan – tujuan yang telah di tetapkan. . Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan – tujuan program. Dalam hal ini yang perlu di perhatikan adalah persiapan implementasi yaitu rancangan dalam membuat keputusan secara matang dalam berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program.

Menurut *Huntington* dalam Mulyadi (2016:24) “perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara untuk melaksanakan pemerintahan”. Tingkat kemampuan dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politburo, kabinet atau presiden negara.

Menurut Gordon dalam Mulyadi (2016:24)

implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan serta menetapkan kebijakan yang telah di seleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit – unit dan metode – metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefenisikan istilah – istilah program ke dalam rencana dan petunjuk – petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrument – instrument mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran – pembayaran.

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:56-57) merumuskan

“implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah di tetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya”. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan – tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dan untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menurut pendapat Hariyoso (2002:143) “esensinya berkaitan dengan aktivitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga tetap pada sasaran”. Sedangkan menurut Griendle dalam Hariyoso (2002:148) mengatakan bahwa “implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mempunyai cakupan cakrawala politis dan administratif”.

Implementasi kebijakan dari program keluarga harapan harus dilakukan dengan beberapa tahap yaitu dimulai dari pemilihan dan penetapan peserta PKH,

adanya pertemuan awal untuk sosialisasi PKH kepada masyarakat yang terpilih, kemudian adanya pembentukan kelompok ibu – ibu penerima PKH, verifikasi komitmen, penanggungan dan pembatalan, serta adanya proses pengaduan kendala – kendala yang terjadi pada program keluarga harapan. Serta keberhasilan dari implementasi program keluarga harapan tidak akan terlepas dari peran pendamping, adanya komunikasi yang terbangun, serta peran dari peserta program keluarga harapan dengan komitmen dalam pelaksanaan kewajibannya.

Terkait dengan implementasi kebijakan, terdapat model – model implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijaksanaan yang semakin kompleks. Maka dari itu diperlukan teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis.

Adapun model – model implementasi kebijakan adalah model yang dikembangkan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Mulyadi (2016:72) menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi. Serta standard dan sasaran kebijakan harus bersifat realistis dengan sosio kultur ada di level pelaksana kebijakan dan ketika ukuran sasaran kebijakan terlalu ideal maka sulit di realisasikan.
2. Sumber daya
Kebijakan perlu di dukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Keberhasilan dari suatu program sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya paling dalam menentukan keberhasilan proses implementasi dari suatu program.
3. Karakteristik agen pelaksana
Sejauh mana kelompok – kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian

juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

4. Sikap para pelaksana
Sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhalisan atau tidak berhasilnya kinerja pelayanan publik.
5. Komunikasi organisasi Pelaksana
Agar kebijakan bisa di laksanakan dengan efektif, menurut Varn Horn dan Van Meter menjadi standard dan tujuan harus di pahami oleh implementor. Agar mencapai tujuan kebijakan maka harus di komunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para agen pelaksana tentang apa yang menjadi standard dan tujuan harus konsisten dari berbagai sumber informasi.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Horn dan Van Meter lingkungan eksternal harus turut mendorong keberhasilan dari kebijakan publik yang di tetapkan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh penting pada keinginan dan kemampuan yuridiksi atau organisasi dalam mendukung struktur, vitalitas, dan keahlian serta tingkat dukungan politik yang dimiliki sehingga berpengaruh langsung terhadap pemberian kebijakan.

Variabel – variabel yang di kemukakan oleh Van Meter dan Varn Horn dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan yaitu suatu program ataupun kebijakan yang dibuat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk melihat kejelasan dan sasaran kebijakan agar dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan dari program yang telah di jalankan. Sumber daya dalam variabel implementasi kebijakan terbagi dalam dua jenis yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam suatu program sumber daya manusia paling utama dalam menjalankan program tersebut. Sikap dari para pelaksana kebijakan menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah organisasi. Komunikasi antar organisasi pelaksana sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan suatu program maupun kebijakan. Kemudian

pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik menunjukkan bahwa keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan. Pencapaian kesuksesan dari program ataupun kebijakan harus diimplementasikan secara efektif, namun jika terjadi kegagalan karena kebijakan tidak di susun dengan baik atau karena faktor lainnya.

2.3 Kemiskinan dan Permasalahannya

Permasalahan dari kemiskinan karena ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti untuk makan, pakaian, tempat tinggal, pada pendidikan dan pada kesehatan. Menurut Husni (1993 : 155) berpendapat “kemiskinan di sebabkan karena kemalasan (keteledoran) dan ketidakmampuan dalam bekerja dan kehilangan syarat – syarat untuk bekerja”.

Sebagian ahli mendefenisikan kemiskinan sebagai fenomena ekonomi dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak memiliki mata pencaharian yang cukup mapan untuk bergantung hidup. Pendapat tersebut di anggap benar, akan tetapi di akui ataupun tidaknya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya di hadapi keluarga miskin. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata – mata kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan standar hidup layak, akan tetapi lebih dari esensi kemiskinan adalah yang menyangkut probabilitas orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan hidup serta mengembangkan usaha dan taraf kehidupannya.

Teori kemiskinan budaya (*cultural poverty*) yang di kemukakan Oscar Lewis dalam Listiyaningsih (2004:35) menyatakan bahwa

Kemiskinan dapat muncul dari dalam diri si miskin (faktor internal) sebagai akibat adanya nilai – nilai atau kebudayaan yang di anut oleh orang – orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, dan lain – lain. Sedangkan faktor eksternal yang datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan antara lain adalah

birokrasi atau peraturan – peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya.

Kemiskinan juga di sebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan dan terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga seseorang sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan akan membuat motivasi dan kesadaran untuk terlepas dari kondisi kemiskinan.

Kriteria pengukuran kemiskinan menurut BPS pada Pendataan Sosial-Ekonomi Penduduk Tahun 2005 (PSE05) dalam Akhmadi, DKK (2016 : 7) :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² per orang.
2. Lantai bangunan tempat tinggal nya terbuat dari tanah/bamboo/kayu/murahan.
3. Dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah dan tembok tanpa di plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama – sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlingung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari – hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
13. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

2.4 Pendidikan dan Perkembangannya

Pendidikan menjadi sangat penting karena dengan pendidikan akan menumbuhkan serta mengembangkan karakter dan kecakapan seseorang baik dalam pembawaan jasmani maupun rohani. Dengan pendidikan akan menanamkan

nilai – nilai dan norma – norma yang positif dalam kehidupan. Serta Pendidikan juga akan mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, serta keterampilan sangat di perlukan oleh setiap manusia. Berikut defenisi pendidikan menurut Abdul Kadir, DKK (2012 : 59) menyatakan bahwa

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “*paedagogie*” Yunani, terdiri dari kata “*pais*” artinya anak dan “*again*” artinya membimbing, jadi jika diartikan *paedaggogie* artinya bimbingan yang di berikan kepada anak, dalam bahasa Romawi berasal dari kata “*educate*” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam, sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan di istilahkan dengan kata “*to educate*” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual.

Menurut UU RI No. 20 tahun 2003

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara.

Perkembangan pendidikan di Indonesia yaitu perkembangan pendidikan masih sangat minim karena masih banyak anak – anak yang tidak dapat bersekolah di karenakan kondisi ekonomi yang tidak memadai serta anak – anak yang tidak mau bersekolah karena di bebani dengan ikut mencari uang bagi keluarganya.

2.5 Program Keluarga Harapan (Permensos Nomor 1 Tahun 2018)

2.5.1 Pengertian Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPN) tahun 2005 – 2025 (UU No. 17 tahun 2007).

Program keluarga harapan di luncurkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gorontalo pada bulan Juli 2007. Pada awal di laksanakan di tujuh provinsi melibatkan 500.000 kepala rumah tangga yang menerima manfaat. Tujuh provinsi tersebut adalah Gorontalo, Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program ataupun tahap uji coba, dan tujuan di uji coba untuk menguji berbagai instrumen yang di perlukan dalam pelaksanaan program keluarga harapan antara lain metode penentu sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, serta pengaduan masyarakat. Buku pedoman Pelaksanaan PKH Kementerian Sosial RI (2019 : 10) menyatakan bahwa

Tahun 2008 daerah penerima program keluarga harapan bertambah menjadi 13 provinsi, enam tambahan daerah nya yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Program keluarga harapan di laksanakan di 72 kabupaten dan 13 provinsi dengan penerima program keluarga harapan 700ribu.

Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 dalam pedoman pelaksanaan PKH tahun 2019 (2019:9) tentang pelaksanaan program keluarga harapan di terbitkan dengan pertimbangan yaitu pada pasal 1 :

1. Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberi bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, di olah oleh pusat data dan informasi.
2. PKH akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit di jangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
3. Bantuan sosial adalah satuan kerja pada kementerian/kelembagaan pada pemerintah pusat atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah.

Menurut Kementerian Sosial RI dalam mendukung kegiatan program keluarga harapan upaya yang harus di lakukan pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi

Koordinasi yaitu kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah supaya tujuan dan fungsi program keluarga harapan dapat terlaksana dengan baik.

2. Sosialisasi dan komitmen

Supaya terlaksana program keluarga harapan yang baik maka harus ada sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta kepada masyarakat.

3. Monitoring dan evaluasi

Monitoring yaitu memantau pelaksanaan program keluarga harapan serta di evaluasi untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program keluarga harapan.

Berikut tahap – tahap pelaksanaan program keluarga harapan berdasarkan buku pedoman yaitu:

1. Perencanaan

Proses perencanaan di lakukan pada tahap awal pembentukan program keluarga harapan. Proses perencanaan yaitu untuk menentukan lokasi dan menentukan jumlah masyarakat yang layak untuk penerimaan bantuan program keluarga harapan. Jumlah masyarakat penerima bantuan di ambil dari sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2. Penetapan Calon Peserta

Penetapan calon peserta bantuan PKH di lakukan untuk menentukan siapa masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan PKH. Data kemiskinan

menjadi bahan untuk penetapan wilayah dan peserta PKH. Dalam penetapan peserta PKH di tetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI serta data peserta di ambil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan usulan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

3. Persiapan Daerah

Setelah di tetapkan lokasi dan calon peserta kemudian pihak Kementerian sosial kembali melakukan daerah lokasi untuk perluasan program keluarga harapan dan pihak Kementerian Sosial juga akan melakukan persiapan dan berkordinasi dengan Dinas / Instansi sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyediakan infrastruktur mendukung pelaksanaan program keluarga harapan. Dengan kantor Kecamatan menyediakan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program keluarga harapan di tingkat Kecamatan. Kemudian pihak Kementerian Sosial juga melakukan sosialisasi PKH kepada tim koordinasi Kabupaten / Kota dan kepada aparatur pemerintah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

4. Pertemuan Awal dan Validasi

Tahap selanjutnya melakukan pertemuan dan validasi dengan pihak instansi/kantor pemerintah tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta dengan calon penerima bantuan program keluarga harapan. Pertemuan dan validasi di lakukan agar calon penerima bantuan memiliki pemahaman tentang program keluarga harapan dan memiliki kesiapan sebagai penerima manfaat PKH, pendamping juga ikut serta dalam melakukan sosialisasi pertemuan awal.

Pertemuan awal di lakukan sekaligus melakukan validasi data untuk mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan fakta dan bukti kondisi terkini

sehingga di peroleh data yang valid sesuai dengan kriteria penerima bantuan PKH yang terdapat dalam buku pedoman PKH.

5. Penetapan Keluarga Penerima Bantuan PKH

Masyarakat yang terpilih sebagai penerima bantuan PKH adalah keluarga yang sudah memenuhi kriteria dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan buku pedoman yang di buat oleh pihak Kementerian Sosial. Kemudian dari hasil validasi data masyarakat penerima bantuan PKH telah di bukakan rekening Bank dan hasil verifikasi ataupun pemutakhiran data penetapan keluarga penerima manfaat PKH di lakukan melalui keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

6. Penyaluran bantuan

Bantuan sosial program keluarga harapan yang di berikan dalam bentuk uang tunai dan di ambil masyarakat ke Pos Indonesia, namun mulai tahun 2016 beralih dari tunai menjadi non-tunai . bantuan PKH di cairkan melalui buku tabungan rekening dan ATM. Rekening penerima bantuan sosial di bukakan secara kolektif sesuai data yang telah di serahkan dari Kemeterian Sosial kepada pihak Bank sebagai penyalur dana bantuan.

Tahapan penyaluran bantuan sosial di lakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran dan pencairan dana ke masyarakat dengan setiap tiga bulan sekali. Untuk pemanfaatan dana bantuan sosial yang di terima oleh peserta PKH dapat di manfaatkan untuk pelayanan kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan program keluarga harapan.

7. Pendampingan

Pendampingan di lakukan bagi para penerima bantuan PKH di perlukan untuk mempercepat proses pencapaian salah satu tujuan PKH yaitu untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta layanan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai perubahan perilaku yang di harapkan pendamping pelaksana PKH mempunyai peran dan fungsi sebagai fasilitator, mediator, advocator, educator, sekaligus motivator bagi peserta bantuan PKH.

8. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

P2K2 adalah pertemuan rutin setiap bulan yang di buat pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat di buat secara berkelompok dan pertemuan ini di buat dari awal pembentukan program keluarga harapan. Tujuan dari P2K2 ini untuk meningkatkan pengetahuan keluarga penerima manfaat mengenai pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak – anaknya di sekolah, meningkatkan pengetahuan tentang keuangan dan harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan penerima manfaat PKH, serta meningkatkan kesadaran masyarakat keluarga penerima manfaat dalam hal kesehatan, dan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan kekerasan kepada anak dan harus memenuhi hak – hak anak.

2.5.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan dari program keluarga harapan yaitu suatu program yang membantu keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penangan fakir miskin.

Tujuan utama pada program keluarga harapan tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan PKH (2019 : 25) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan produk manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima.

Kemudian tujuan khusus dari program keluarga harapan dalam Pedoman

Pelaksanaan PKH (2019 : 25) yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM.
2. Meningkatkan status kesehatan gizi dan ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak – anak usia 5 – 7 tahun yang belum masuk Sekolah Dasar dari RTSM.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi anak – anak RTSM.
4. Meningkatkan taraf pendidikan anak – anak RTSM.
5. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin.

1.5.3 Manfaat Program Keluarga Harapan

Adapun manfaat dari keluarga harapan dalam Pedoman Pelaksanaan PKH (2019: 26) yaitu sebagai berikut:

- Dalam jangka pendek memberikan *income effect* kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
- Dengan jangka panjang memutus rantai kemiskinan antar generasi berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kapasitas anak di masa depan.
 - b. Memberikan kepastian kepada si anak di masa yang akan datang yaitu melalui pendidikan
- Merubah perilaku masyarakat penerima bantuan dalam memberikan perhatian yang besar pada bidang pendidikan dan kesehatan anak.
- Mengurangi pekerja anak.
- Mempercepat pencapaian *Millennium Development Goals* (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, mengurangi kematian balita, serta meningkatkan kesetaraan gender).

1.5.4 PKH Bidang Pendidikan

Usia tujuh tahun sampai delapan belas tahun merupakan usia penting dalam mengenyam pendidikan, dengan usia tersebut di wajib kan kepada setiap

anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar mulai dari tingkat SD, SMP / SLTP dan SMA / SLTA. Adapun syaratnya yaitu harus terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan dan kehadiran di kelas minimal 85%. Rendahnya pendapatan pada keluarga berpenghasilan rendah menyebabkan keluarga miskin tidak mampu untuk memenuhi biaya pendidikan, sehingga sekarang ini banyak anak usia sekolah tidak dapat bersekolah dan terpaksa ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya.

Rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat miskin karena di akibatkan kondisi ekonomi tidak bisa membayar biaya pendidikan yang mahal. Dengan hal tersebut pemerintah berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan derajat pendidikan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah selalu berupaya memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan khususnya memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal.

Pedoman Pelaksanaan PKH (2019 : 17)

Program pemerintah untuk mengurangi jumlah putus sekolah pada tingkat sekolah dasar cukup berhasil. Hal tersebut di lihat pada Data Pendidikan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud tahun 2017 jumlah siswa putus sekolah tingkat sekolah dasar menunjukkan penurunan sejak tahun ajaran 2015/2016 2016/2017 dan 2017/2018. Hal yang sama terjadi pada tingkat sekolah menengah atas. Perkembangan jumlah putus sekolah yang harus menjadi perhatian ada pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah kejuruan. Angka Partisipasi (APM) di hitung dari jumlah siswa per jumlah penduduk usia sekolah pada masing – masing jenjang. Jumlah anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan dasar menjadi salah satu indikator keberhasilan program menurunkan angka putus sekolah.

Salah satu pelayanan sosial yang di berikan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu salah satu kebijakannya tentang membantu pendidikan masyarakat miskin. Dengan PKH tersebut pemerintah berharap tidak

ada lagi anak – anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pemerintah juga berharap anak – anak yang cerdas dan berprestasi karena Negara Indonesia membutuhkan anak – anak tersebut untuk di masa depan yang bisa membuat Negara ini menjadi lebih baik lagi.

1.5.5 Sasaran Penerima PKH

Sasaran penerima bantuan program keluarga harapan harus terdaftar dalam data terpadu program keluarga fakir miskin, di olah oleh pusat data dan kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sasaran penerima PKH dalam Pedoman Pelaksanaan PKH (2019:26-27) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan
 - a. Ibu hamil, nifas dan ibu menyusui
 - b. Anak usia 0 – 6 tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan
 - a. Anak sekolah dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat.
 - b. Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat.
 - c. Anak Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat.
 - d. Anak usia 6 – 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial
 - a. Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas.
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas yang berat.

Indeks dan komponen bantuan sosial program keluarga harapan pada tahun 2019 yaitu:

Bantuan tetap setiap keluarga di berikan hanya tahap pertama

1. Reguler sebesar Rp. 550.000/keluarga/tahun.
2. PKH akses sebesar Rp. 1.000.000/keluarga/tahun.

Bantuan kategori setiap jiwa maksimal empat orang dalam satu keluarga:

1. Bantuan sosial program keluarga harapan pada ibu hamil sebesar Rp. 2.400.000
2. Bantuan sosial pada anak usia dini sebesar Rp. 2.400.000
3. Bantuan sosial program keluarga harapan pada anak sekolah
 - a. Tingkat SD sebesar Rp. 900.000
 - b. Tingkat SMP sebesar Rp. 1.500.000
 - c. Tingkat SMA sebesar Rp. 2.000.000
4. Bantuan sosial pada Dissabilitas Rp. 2.400.000
5. Bantuan pada lanjut usia sebesar Rp. 2.400.000

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu uraian ataupun narasi pada kerangka konsep sebagai pemecahan masalah pada penelitian. Peneliti berusaha membahas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini, pembahasan tersebut akan di jelaskan dengan menggunakan teori yang berhubungan untuk membantu menjawab masalah penelitian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area).

Dengan pembahasan peneliti menuliskan tentang pengertian dari implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (20016:56-57) merumuskan “implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang di lakukan oleh badan publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah di tetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya”. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan – tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang di tetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan.

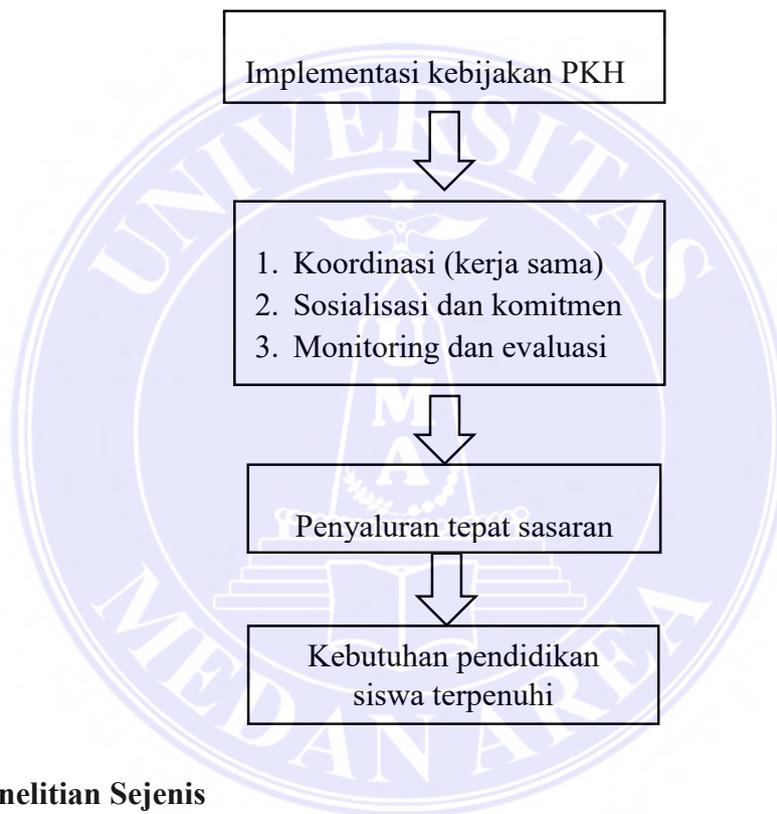
Dalam UU No. 17 tahun 2007 “program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPJ) tahun 2005 – 2025”.

Implementasi kebijakan dari program keluarga harapan harus di lakukan dengan beberapa tahap yaitu di mulai dari pemilihan dan penetapan peserta PKH, adanya pertemuan awal untuk sosialisasi PKH kepada masyarakat yang terpilih, kemudian adanya pembentukan kelompok ibu – ibu penerima PKH, verifikasi komitmen, penangguhan dan pembatalan, serta adanya proses pengaduan kendala – kendala yang terjadi pada program keluarga harapan. Serta keberhasilan dari implementasi program keluarga harapan tidak akan terlepas dari peran pendamping, adanya komunikasi yang terbangun, serta peran dari peserta program keluarga harapan dengan komitmen dalam pelaksanaan kewajibannya.

Menurut Kementerian Sosial RI dalam mendukung kegiatan program keluarga harapan upaya yang harus dilakukan pemerintah desa yaitu koordinasi

(kerja sama), sosialisasi dan komitmen, serta monitoring dan evaluasi. Setelah program diberikan pada tepat sasaran maka pemerintah berharap masyarakat penerima PKH dapat mensejahterakan keluarga dan kebutuhan sekolah anak – anaknya akan terpenuhi. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.7 Penelitian Sejenis

Penelitian sejenis di gunakan untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal – hal yang sama pada penelitian ini. Berdasarkan penelitian sejenis yang di temukan oleh penulis, mengenai tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan maupun implementasi nya di antaranya adalah penelitian skripsi Muhammad Ikbal tahun 2017 dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan

Tembung.” Hasil penelitiannya menunjukkan kegiatan yang dilakukan dapat di simpulkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja penyaluran bantuannya tidak tepat waktu. Implementasi dapat di lihat dari beberapa variabel implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi serta kondisi sosial dan ekonomi. Adapun kesimpulan dari penelitian dapat di jelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Indra Kasih terdiri dari mekanisme dan prosedur, kesesuaian jumlah Universitas Sumatera Utara bantuan, manfaat dana bagi peserta PKH dan waktu pembagian dana. Untuk mekanisme dan prosedur, kesesuaian jumlah bantuan yang di terima oleh peserta telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan PKH, begitu juga dengan manfaat dana PKH yang sudah meringankan beban peserta PKH baik di bidang pendidikan maupun kesehatan serta kesejahteraan sosial. Namun untuk ketetapan waktu pencairan belum tepat waktu dari jadwal yang sudah di tetapkan.
2. Kondisi Sosial Ekonomi. Para peserta PKH di Kelurahan Indra Kasih secara garis besar telah patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban mereka baik itu komponen kesehatan maupun pendidikan serta Universitas Sumatera Utara kesejahteraan sosial. Bagi peserta yang memiliki balita, mereka telah membawa ke posyandu dan sedangkan bagi peserta yang usia SD dan SMP telah hadir ke sekolah dengan jumlah kehadiran yang tidak melanggar ketentuan PKH.

Berikutnya adalah penelitian sejenis kedua yaitu skripsi penelitian Nurfahira Syamsir yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Dibidang Pendidikan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar” pada tahun 2014.

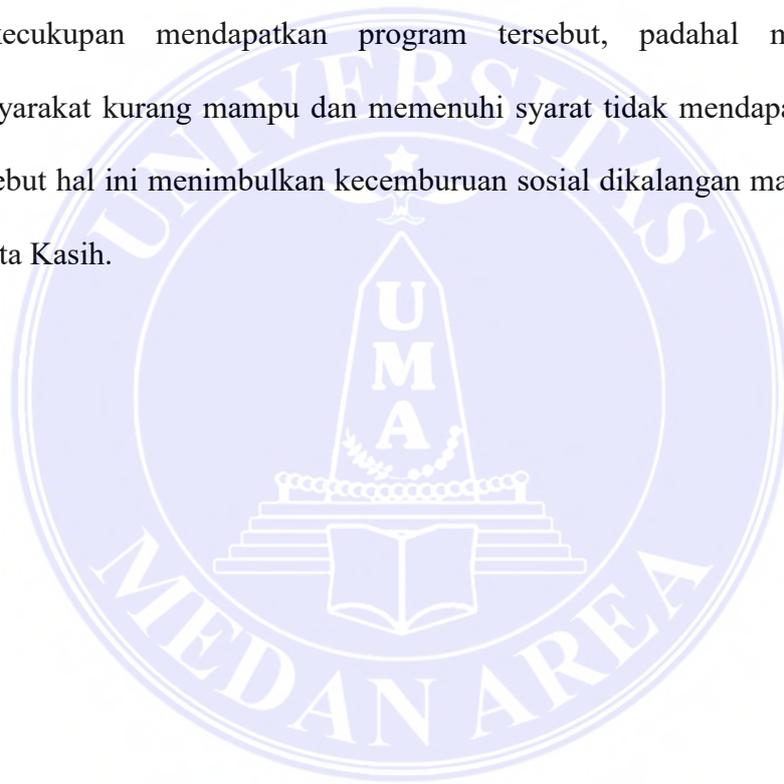
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian Nurfahira Syamsir yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi PKH bidang pendidikan di kecamatan Tamalate sudah berjalan baik karena peaksanaan nya selalu di kawal oleh pendamping yang sudah direkrut oleh pemerintah pusat.
2. Dengan digulirkan nya program keluarga harapan telah membuka kesadaran RTSM di Kecamatan Tamalate bahwa miskin itu tidak baik. Kesadaran para RTSM terbukti dengan selalu memberikan motivasi kepada anak – anaknya agar rajin kesekolah. PKH pendidikan juga memberikan dampak besar terhadap akses dan tingkat kehadiran akan – anak dari RTSM di layanan pendidikan. Karena pendamping selalu mengontrol tingkat kehadiran anak – anak di sekolah melalui verifikasi absen yang telah dilakukan guru masing – masing disekolah.
3. Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan PKH pendidikan di Kecamatan Tamalate di antaranya: 1. Proses verifikasi di layanan pendidikan yang kurang bersahabat. 2. Koordinasi lintas sektoral yang belum berjalan optimal. Terkadang pihak sekolah kewalahan untuk memverifikasi karena tidak adanya data yang dipegang. 4. Tidak adanya pelaporan mengenai penerima program dari pendamping kepada SKPD setempat. 5. Belum tersedianya kantor sekretarian UPPKH Kecamatan dan 6. Belum tersedianya buku pedoman operasional PKH bagi penerima Pelayanan Pendidikan.

Penelitian sejenis ketiga yaitu skripsi penelitian oleh Yesi Artika BR Sitepu yang berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Desa Minta Kasih

Kecamatan Salapin Kabupaten Langkat” pada tahun 2019. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan program keluarga harapan di desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat belum optimal, meskipun pihak desa yang terkait dalam program sudah memberikan semua upaya yang terbaik untuk masyarakatnya, akan tetapi pada kenyataannya ketidatepatan sasaran masyarakat penerima program tersebut masih terjadi dimana perekonomian masyarakat yang berkecukupan mendapatkan program tersebut, padahal masih banyak masyarakat kurang mampu dan memenuhi syarat tidak mendapatkan program tersebut hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat Desa Minta Kasih.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif termasuk dalam kategori metode penelitian kualitatif yaitu jenis metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan fokus pada implementasi kebijakan program keluarga harapan di bidang pendidikan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2017 : 2) “istilah penelitian kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang di pertentangkan dengan pengamatan kuantitatif”.

Defenisi penelitian kualitatif di kemukakan oleh Kirk dan Miller dalam Moleong (2017 : 4) “metode penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.

Selain dari defenisi tersebut, di bawah ini di kemukakan defenisi lainnya untuk memperoleh gambaran yang luas dan mendalam tentang metode penelitian kualitatif. Defenisi lainnya yaitu menurut David Williams dalam Moleong (2017 : 5) “penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah”.

Dari kedua defenisi tersebut Moleong membuat kesimpulan tentang pengertian metode penelitian kualitatif.

Moleong (2017 : 6)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, dan dalam metode kualitatif biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Berdasarkan defenisi tersebut menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang alamiah dan berinteraksi langsung dengan manusia yang di teliti dan dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode

wawancara, pengamatan dan memerlukan pemanfaatan dokumen agar penelitian yang dilaksanakan sesuai yang di rencanakan. Dengan beberapa defenisi tersebut dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui hasil dari Implementasi Kebijakan Keluarga Harapan Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang terjadi dari objek yang telah di teliti untuk mendapatkan data – data penelitian yang akurat. Berdasarkan judul penelitian yang di angkat yaitu “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area)” maka lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area. Lebih tepatnya terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. Pada penelitian ini di mulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan September 2020.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan informasi tentang masalah ataupun kondisi yang di teliti. Pengumpulan data menurut adanya pertemuan langsung atau komunikasi langsung antara peneliti dengan orang yang di anggap tahu tentang situasi sosial dan informan. Yang di maksud dengan informan dalam penelitian ini yaitu orang – orang yang mengetahui, berurusan, dan

membutuhkan pelayanan dari program tersebut. Berikut di bawah ini definisi informan menurut Moleong.

Moleong (2005 : 133) “informan merupakan orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian, informan yang di perlukan dalam penelitian kualitatif terbagi tiga yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan”.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi yaitu:

1. Informan kunci adalah orang – orang yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang di teliti. Adapun informan kunci pada penelitian ini yaitu Bapak Dedy Irwanto Pardede, SP, MAP selaku koordinator program keluarga harapan di pelaksana PKH Dinas Sosial Kota Medan.
2. Informan utama adalah orang – orang yang mengetahui secara detail dan teknis dan ikut terlibat langsung dalam interaksi sosial pada masalah yang di teliti. Informan pertama yaitu Ibu Dini Mulyani, SH selaku pendamping Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kota Matsum IV dan kedua Ibu Hairani selaku masyarakat penerima PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area.
3. Informan tambahan adalah orang – orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam penelitian pembahasan pada masalah yang diteliti. Informan tambahannya yaitu Ibu Sahida Erni Nasution selaku Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah strategis dalam penelitian dan mendapatkan data yang akurat. menurut Moleong (2005 : 137) “metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian kualitatif, adapun metode – metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang di peroleh dari buku – buku, karya ilmiah dan dari pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan di teliti.

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke tempat yang di teliti. Observasi menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2017 : 174) “observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan secara langsung dan peneliti harus mencatat peristiwa dalam situasi yang di teliti”. Observasi yang dilakukan yaitu mengunjungi setiap rumah/kantor dari setiap informan dengan demikian maka peneliti dapat memahami kondisi tentang program keluarga harapan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada informan dengan cara tanya jawab atau dengan melakukan percakapan langsung dan mendalam untuk memperoleh data yang lengkap dari pihak – pihak terkait. Menurut Moleong (2017 : 186) “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua

pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Tujuan dari wawancara pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang implementasi kebijakan program keluarga harapan di bidang pendidikan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan - catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi tersebut bisa dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya – karya dari seseorang. Kemudian hasil dari penelitian melalui observasi atau wawancara akan lebih lengkap di dukung oleh dokumentasi yang berkaitan. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2017 : 216) “dokumentasi adalah setiap pernyataan ataupun peristiwa dalam bentuk tertulis atau bentuk foto oleh seseorang atau lembaga dalam bukti penelitian”. Sebelum dilasanakan wawancara penelitian dengan informan, terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada informan untuk mengambil foto selama proses wawancara berlangsung dan foto informan menjadi sebagai bukti telah melakukan penelitian dengan informan.

5. Triangulasi Data

Triangulasi data digunakan ketika peneliti melakukan pengumpulan data dan menguji kredibilitas data dari berbagai sumber data. Menurut Moleong (2014 : 330) “triangulasi adalah teknik pengumpulan dan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu”. Triangulasi data yang bersifat menggabungkan dari teknik pengumpulan data untuk menentukan keabsahan data dari yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data selesai pada periode tertentu.

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2017 : 248)

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.

Adapun aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data artinya merangkum, memilih hal – hal pokok, fokus pada hal – hal penting dan dicari tema serta pola nya. Maka data yang di reduksi memberikan data yang jelas, mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di perlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar antar kategori dan sebagainya. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data, kompleks ke dalam satuan berbentuk sederhana sehingga mudah di pahami. Banyaknya data menyulitkan peneliti untuk mengolah data dan menyajikan data, karena dengan anaisis penyajian data memudahkan peneliti untuk menyajikan data yang sudah di teliti sebelumnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan adalah langkah akhir dalam sebuah laporan. Penarikan kesimpulan adalah rangkaian analisis data puncak pada sebuah penelitian. Akan tetapi, kesimpulan pada tahap awal harus di dukung oleh data yang valid dan harus konsisten saat peneliti kembali kelapangan dalam pengumpulan data, maka kesimpulan yang di temukan akan menjadi kesimpulan yang kredibel.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Bidang Pendidikan Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area keberhasilannya di lihat dari enam variable dan dapat di simpulkan sebagai berikut:
 - a. Standar dan sasaran kebijakan PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area sudah berjalan dengan optimal, Karena dengan bantuan PKH sangat membantu penerima manfaat terutama dalam membiayai pendidikan dan memenuhi kebutuhan sekolah anak – anak nya. Namun hal nya masih banyak masyarakat miskin yang belum terdaftar mendapatkan bantuan PKHdi karenakan belum ada pembaharuan data mulai dari awal di terapkan bantuan PKH sampai sekarang ini.
 - b. Sumber daya yaitu meliputi proses pelaksanaan PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area di lihat dari sumber daya manusia yaitu pelaksana PKH sudah cukup baik, karena pelaksana PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area sudah memenuhi syarat dan setelah menjadi pelaksana PKH selalu rutin mengikuti pelatihan sesuai buku pedoman yang berlaku. Akan tetapi, pada sumber daya uang yaitu fasilitas dari pelaksana PKH belum memadai di karenakan minim nya anggaran dari pemerintah pusat, serta dana bantuan untuk masyarakat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan dana bantuan hanya cukup untuk biaya pendidikan saja.
 - c. Karakteristik agen pelaksana, dalam variable ini sudah cukup baik karena agen pelaksana baik dari tingkat pusat sampai ke kelurahan sudah menjalankan tugas

Nya dengan baik dan sudah sesuai dengan SOP dan pedoman yang berlaku. Bagi peserta penerima bantuan juga di berikan sanksi terutama pada masyarakat yang melanggar peraturan maka sanksi nya bantuan di cabut serta buku tabungan dan ATM di blokir.

- d. Sikap para pelaksana PKH di lihat dari sikap sudah baik sudah menjalankan tugasnya dengan baik, pelaksana / pendamping PKH juga bersifat tegas bagi masyarakat yang melanggar peraturan.
 - e. Komunikasi organisasi pelaksana merupakan variable paling penting dalam implementasi PKH. Komunikasi antara sesama pelaksana dan dengan masyarakat penerima bantuan yang terjalin berjalan dengan baik, akan tetapi sosialisasi pelaksana PKH Kota Medan dengan penerima bantuan, kantor Kelurahan, dan organisasi eksternal lainnya hanya dilakukan pada awal di terapkan bantuan PKH di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area.
 - f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan hasil penelitian lingkungan sosial dan politik mendukung dan berpengaruh baik dam pengimplementasian program ini. Sementara pada faktor ekonomi penerima bantuan PKH cukup memperhatikan dengan kondisi tersebut penerima bantuan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area sudah layak mendapatkan bantuan tersebut.
2. Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan PKH Di Bidang Pendidikan Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area yaitu masalah pada administrasi yaitu pada nama peserta PKH. Data dari Kementerian Sosial RI tidak sama dengan data dari Kependudukan hal inilah menyebabkan saldo nol ataupun dana bantuan tidak masuk ke ATM peserta PKH. Kendala yang kedua

yaitu masalah anggaran yang diberikan pemerintah untuk pelaksanaan bantuan program keluarga harapan di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area, karena kurangnya anggaran masih banyak kegiatan yang belum dapat terlaksana contohnya kursus bahasa inggris dan kursus matematika untuk anak – anak penerima bantuan serta kegiatan belajar membuat kerajinan, belajar memasak, dan belajar bercocok tanam untuk masyarakat penerima bantuan.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa masalah yang belum terpecahkan maka dari itu peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Medan untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana berupa kantor atau tempat bagi pelaksana PKH dan menambah anggaran dana supaya pelaksanaan kegiatan PKH berjalan dengan maksimal. Pihak Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area melakukan pembaharuan data karena masih banyak masyarakat miskin belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, dengan hal tersebut dana bantuan PKH bisa membantu pendidikan yang layak dan mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah dari lapisan masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, L. 2006. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.

Hariyoso,A.2002.*Pembaharuan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta : Peradaban

Husni,M.1993.*Kehidupan sosial Menurut Islam*, Cet.keempat. Bandung : Diponogoro

Kadir,Abdul,dkk.2012.*Dasar – dasar Pendidikan*. Jakarta : Kharisma.

Keban, YT. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.

Kementerian Sosial RI. 2019. *Pedoman Umum Program Keluarga harapan Tahun 2019*, Direktorat Jenderal Jaminan Sosial : Jakarta.

Kencana,S I. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Rineka Cipta.

Listiyaningsih,U. 2004. *Dinamika Kemiskinan di Yogyakarta, Analisi Data Hasil Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia*, (cetakan ke-1). Yogyakarta : Bulaksumur,G-7.

Muhibbin, S. 2007. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, D. 2016. *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

----- . 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

----- . 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. 2014. *Public Policy*. Jakarta : Gramedia.

Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung : Hakim Publisher.

Tangkilisan, H N. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI.

Perundang – undangan:

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 26/LSJ/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks dan komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.

Undang – undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Program Keluarga Harapan.

Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Skripsi dan Internet:

Anonim. 2019. *Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli*. Guru Pendidikan. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertianpendidikan/> diakses 2 November 2019

Anonim. 2019. *Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*. <https://www.jogloabag.com/komunitas/permensos>. Diakses pada 2 November 2019.

Akhmadi,DKK. 2016. *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendapatan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*. Jakarta : The Smeru Research Institute.

Artika,Y.2019.*Evaluasi Program Keluarga Harapan Didesa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat*. Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Ganang, Indah. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dibidang Pendidikan Di Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*. Jurnal Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya.

Ikbal, M. 2017. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Tembung*. Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara.

Limbong, R D. 2010. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Baru*. Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara.

Munthe, P. 2015. *Pentingnya Evaluasi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*.

Noviantama,Y. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa Di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*. Skripsi universitas Lampung. Diakses dari <https://docplayer.info/539260737> [diakses 2 November 2019].

Program Keluarga Harapan diakses pada 23 September 2019 dari <http://www.Kemosos.go.id/program-keluarga-harapan>.

skripsi universitas Pelita Harapan, Tangerang. Diakses dari <http://scholar.google.co.id/pengertian-program> [diakses 3 November 2019].

Syamsir, N. 2014. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang Pendidikan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. skripsi Universitas Hasanuddin. Diakses dari <https://schollsr.google.co.id/scholar?.scholar.google.com> [diakses 3 November 2019]



DOKUMENTASI



Foto Kantor Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area
Pada tanggal 02 maret 2020
Sumber: dokumen pribadi peneliti



Foto dengan bapak Deddy Irwanto Pardede, S.P, MAP(Koordinator 2 pelaksana PKH Kota Medan) Selaku informan kunci pada tanggal 26 Februari 2020
Sumber: dokumen pribadi peneliti



Foto dengan ibu Dini Mulyani, S.H (pendamping PKH Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area) selaku informan kunci pada tanggal 10-03-2020
sumber : dokumen pribadi peneliti



Foto dengan ibu Yaheni (masyarakat penerima bantuan PKH
Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area)
Selaku informan utama pada tanggal 03 Maret 2020
Sumber: dokumen pribadi peneliti



Foto dengan ibu Hairani (masyarakat penerima bantuan PKH
Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area)
Selaku informan utama pada tanggal 03 Maret 2020
Sumber: dokumen pribadi peneliti.



Foto dengan ibu Hairani (masyarakat penerima bantuan PKH
Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area)
Selaku informan utama pada tanggal 03 Maret 2020
Sumber: dokumen pribadi peneliti.



Foto dengan ibu Sahida Erni NST Kasi pembangunan di Kantor
Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area
(Sebelah kanan peneliti) selaku informan tambahan
Pada tanggal 02 Maret 2020
Sumber: dokumen pribadi peneliti



Foto kondisi tempat tinggal penerima bantuan PKH
Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area
Sumber: dokumen pribadi informan



Foto kondisi tempat tinggal penerima bantuan PKH
Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area
Sumber: dokumen pribadi informan.

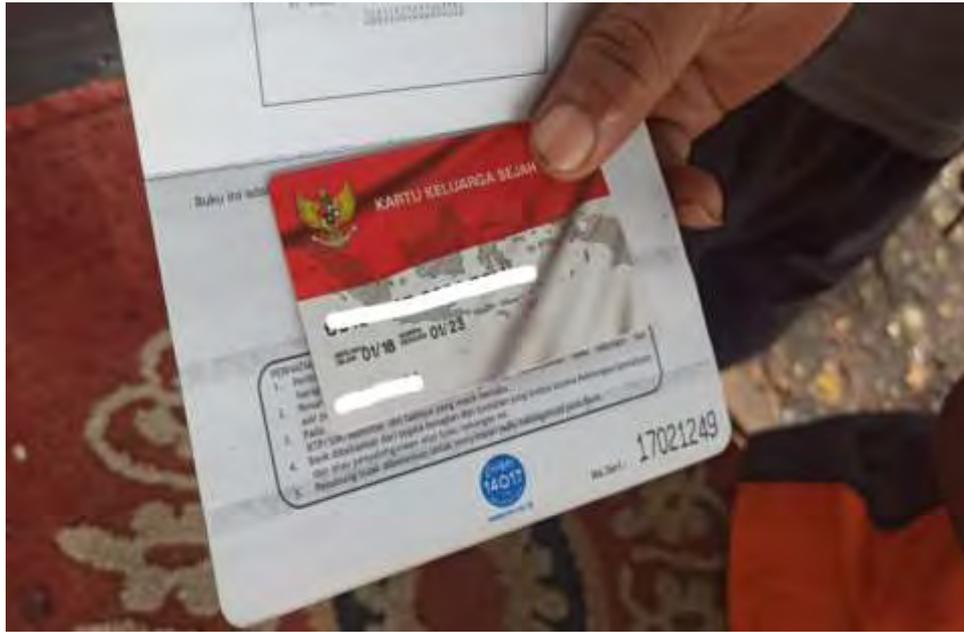


Foto buku tabungan dan kartu ATM bantuan PKH
Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area
Sumber: dokumen pribadi informan.



Foto kondisi tempat tinggal penerima bantuan PKH
Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area
Sumber: dokumen pribadi informan.



Foto kondisi tempat tinggal penerima bantuan PKH
Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area
Sumber: dokumen pribadi informan.



Foto kondisi tempat tinggal penerima bantuan PKH
Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area
Sumber: dokumen pribadi informan.



Foto kondisi tempat tinggal penerima bantuan PKH
Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area
Sumber: dokumen pribadi informan.



Foto dengan ibu Yusdina (masyarakat penerima bantuan PKH
Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area)
Selaku informan utama pada tanggal 03 September 2020
Sumber: dokumen pribadi peneliti.



Foto dengan ibu Yusdina (masyarakat penerima bantuan PKH
Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area)
Selaku informan utama pada tanggal 03 September 2020
Sumber: dokumen pribadi peneliti.



Foto dengan Akbar (anak penerima bantuan PKH Di Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area)Selaku informan utama pada tanggal 03 September 2020
Sumber: dokumen pribadi peneliti.



Foto dengan bapak Syamsul Bahri (masyarakat penerima bantuan PKH Di KelurahanKota Matsum IV Kec. Medan Area)Selaku informan utama pada tanggal 03 September 2020
Sumber: dokumen pribadi peneliti.

No	Nama	Jenis Informan	Alamat	Pekerjaan
1.	Dedy Irwanro Pardede, SP, MAP	Informan kunci	Medan Polonia	Koordinator 2 PKH Kota Medan
2.	Dini Mulyani, S.H	Informan kunci	Jl. Kampung Boyan, Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area	Pendamping PKH
3.	Yaheni	Informan utama	Jl. Halat Gg. Berdikari	Ibu Rumah Tangga
4.	Hairani	Informan utama	Jl. Halat Gg. Berdikari	Ibu rumah tangga
5.	Nelly Suryani	Informan utama	Jl. Halat Gg. Berdikari	Ibu rumah tangga
6.	Yusdina	Informan utama	Jl. Laksana Gg. Bunga	Ibu rumah tangga
7.	Yusrawati	Informan utama	Jl. Laksana lingkungan 17	Asisten rumah tangga
8.	Syamsul Bahri	Informan utama	Jl. Halat Gg. Sekolah	Penjaga & petugas kebersihan kantor Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area
9.	Akbar	Informan utama	Jl. Laksana Gg. Bunga	Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)
10.	Sahida Erni NST	Informan tambahan	Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Area	Staff Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7300078, 7360168, 7364348, 7366781, Fax: (061) 7369908 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setibudi Nomor 79 / Jalan Cal Sanyu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax: (061) 8225331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medan@uma.ac.id

Nomor : 132 /FIS.2/01.10/II/2020
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

11 Februari 2020

Kepada Yth,
Ka. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Jl.Kapten Maulana Lubis No.2 Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

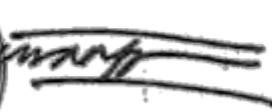
Nama : Nurul Jannah
N P M : 168520030
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH), dengan judul Skripsi "*Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area)*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hery Kusmanto, MA
FAKULTAS ISIPOL

CC: File-



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS SOSIAL

Jl. Pinang Baris / Jl. T. B. Smanatupang (Belakang Terminal)
No. 114 B Medan

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 / 588

Berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor.070/190/Balitbang/2020 Tanggal 15 Februari 2020, Tentang Rekomendasi Penelitian dengan ini Dinas Sosial Kota Medan, Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

- Nama : Nurul Jannah
- NPM : 168520030
- Prodi : Administrasi Publik
- Judul : "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area)".

Menerangkan bahwasanya mahasiswa/i atas nama tersebut di atas telah melakukan riset dalam bentuk wawancara kepada Pejabat Dinas Sosial Kota Medan.
Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 15 Juli 2020
An. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN
SEKRETARIS

FAKRIUDDIN, SH
Perbina Tk. I
No. 19850104 198503 1 011



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN AREA
KELURAHAN KOTAMATSUM IV

Alamat Kantor : Jl. Utama No. 83 Medan 20215

No : 4417/ 97

Lamp :

Sifat : Penting

Perihal : Telah dilakukannya Penelitian.

Medan, 17 Juli 2020

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

di -

Tempat.

Sehubungan dengan adanya surat No : 070/190/Balitbang/2020 Perihal : Permohonan Penelitian, bersama ini saya sampaikan kepada Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan bahwa Saudara Nurul Jannah telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area dengan judul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

